

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	9
2.1 Teori Dasar Konflik	9
2.2 Sumber Konflik	11
2.2.1 Identitas Kelompok	13
2.2.2 Diversifikasi Kepentingan.....	14
2.2.3 Teori Kebutuhan Manusia	15
2.3 Konservasi Lokal Dalam Hutan Produksi.....	18
2.4 Relasi Konflik dan Konservasi Hutan Produksi	20
2.5 Bentuk-Bentuk Manifestasi Konflik	23
2.5.1 Sifat Dasar Perbanditan Sosial.....	26
2.6 Manfaat Konflik	27
2.7 Resolusi Konflik	28
 BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.2 Metode Dasar	32
3.3 Metode Pengambilan Data	33
3.4 Analisis Data	34

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	35
4.1	Gambaran Umum Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Segorogunung.....	35
4.2	Desa Nglinduk.....	37
4.3	Desa Tahunan.....	45
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
5.1.1	GABUS SEBAGAI MOZAIK KONFLIK YANG TERSEMBUNYI.....	53
5.1.1.1	Mozaik konflik hutan jati	54
5.1.1.2	Kebutuhan jati masyarakat	55
5.1.1.3	Dualisme mata pencaharian masyarakat	58
5.1.1.4	Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat.....	60
5.1.1.5	Relasi antar kelompok blandong dan pengrajin.....	61
5.1.1.6	Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik	62
5.1.2	Pemetaan kepentingan	65
5.1.2.1	Perbedaan kepentingan.....	65
5.1.2.2	Kepentingan masyarakat pengrajin.....	65
5.1.2.3	Kepentingan masyarakat sekitar hutan.....	66
5.1.2.4	Kepentingan pihak lain.....	67
5.1.2.5	Pemicu konflik masyarakat/alasan yg mendasari Kepentingan.....	67
5.1.2.6	Pandangan masyarakat terhadap kepentingan pihak lain	70
5.1.2.7	Konflik internal dan keterlibatan oknum Perhutani.....	72
5.1.3	Perjalanan kayu dari hutan-masyarakat pengrajin.....	73
5.1.3.1	Deskripsi pencurian.....	73
5.1.3.1.1	Pencurian oleh oknum Perhutani.....	73
5.1.3.1.2	Pencurian subsistensi	73
5.1.3.2	Strategi dan Penggolongan pencurian subsistensi	78
5.1.4	Dinamika Konflik.....	81
5.1.4.1	Intensitas pencurian.....	81
5.1.4.2	urutan kejadian.....	84
5.1.4.3	Peran gender dalam pencurian.....	85
5.1.4.4	Manifestasi Konflik.....	85
5.1.4.5	Konflik yang tidak realistis	87
5.1.4.6	Konflik sehari-hari	89
5.1.4.7	Ketegangan-ketegangan sehari-hari Cepat berkembangnya isu-isu.....	90
5.1.5	Melihat lebih dekat masyarakat pengrajin	91
5.1.5.1	Kompetisi bahan baku	92
5.1.5.2	Perlawanan terhadap tata niaga kayu	92
5.1.5.3	Tingkat kebutuhan kayu dan kisaran harga	94
5.1.5.4	Harga kayu illegal	98
5.1.6	Pemasaran kayu TPK Perhutani	100
5.1.6.1	Proses masuknya kayu ke TPK.....	100
5.1.6.2	Sistem penjualan	100

5.1.6.3 Berkaca pada warung kayu KPH Randublatung di Blora	101
5.1.6.4 Tingkat harga perhutani	101
5.1.6.5 Perbandingan harga kayu resmi Perhutani	102
5.1.6 Partisipasi pengrajin	103
5.1.7 Alur perizinan SKSHH	104
5.1.7.1 Persyaratan penerbitan SKSHH	104
5.1.7.2 Tata cara pelaksanaan	105
5.1.8 Pemicu konflik oleh kesewenangan aparat dan Implikasi dalam konflik masyarakat	107
5.1.9 Pemetaan Konflik	111
5.1.9.1 Peta konflik	111
5.1.9.2 Pohon konflik	113
5.1.10 Kelompok-kelompok pejuang	114
5.1.11 Pengaruh kapitalisme dan modernitas	116
5.1.12 Konflik dan konservasi hutan produksi	118
5.2 MELIHAT KEARIFAN LOKAL	119
5.2.1 Persepsi masyarakat terhadap kelestarian	119
5.2.2 Interaksi masyarakat dengan hutan sebagai bentuk kearifan Lokal	120
5.2.3 Kearifan setempat terhadap keterbatasan sumber ekonomi Dalam kehidupan bermasyarakat	123
5.2.4 Hubungan konflik dan kearifan dalam konservasi	127
5.3 UPAYA PENANGANAN KONFLIK YANG TELAH ADA	129
5.3 Upaya pihak Perhutani dalam lingkup BKPH	129
5.3.1. Pendekatan polisional	129
5.3.1.1 Polter	129
5.3.1.2 Patroli Gabungan Mandiri (Pam swakarsa)	129
5.3.1.3 Pos PHH (Pos Pemeriksaan Hasil Hutan)	130
5.3.1.4 Operasi skala besar (Operasi Wana Lestari)	130
5.3.2 Pendekatan Sosial	131
5.3.2.1 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)	131
5.3.2.2 Sekilas LMDH Wana Kencana	132
5.3.2.3 Perlunya Sosialisasi PHBM dengan Warga	134
5.3.3 Upaya pihak dinas Dipertanhutbun	135
5.3.4 Peredam konflik oleh masyarakat	135
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	137
6.1 Kesimpulan	137
6.2 Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	144